

**RELEVANSI PRINSIP FILSAFAT PENDIDIKAN ISLAM TERHADAP
DEMOKRATISASI PENDIDIKAN DI INDONESIA**

Salma Kusuma Listiani¹, Abdul Khobir², Rosalina³, Baihaqi⁴

¹Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

²Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

³Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

⁴Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

¹salma.kusuma.listiani24041@mhs.uingusdur.ac.id

²abdul.khobir@uingusdur.ac.id

³rosalina24039@mhs.uingusdur.ac.id

⁴baihaqi24040@mhs.uingusdur.ac.id

ABSTRACT

This study aims to analyze the relevance of the principles of Islamic Educational Philosophy to the process of democratization of education in Indonesia. The democratization of education is understood as an effort to create equal access and learning opportunities for all citizens, in line with the values of justice, equality, deliberation, and respect for human dignity, which are fundamental principles in Islamic teachings. Using qualitative research methods with a library study, this study examines literature related to the concept of democratization of education, the values of Islamic educational philosophy, and various problems in implementing democratization in Indonesia. The results show that the democratization of education in Indonesia still faces obstacles in the form of unequal access, an authoritarian learning culture, a mismatch between policy and implementation, the challenges of the digital era, and the degradation of moral and spiritual values. The principles of Islamic education such as monotheism, shura, justice, moderation, and the obligation to seek knowledge offer a philosophical and normative foundation to strengthen the democratization of education to be more inclusive, humanistic, and oriented towards character building. This study confirms that the integration of Islamic values in the national education system can be a solution in realizing education that is fair, participatory, and relevant to current developments.

Keywords: Democratization Of Education, Islamic Philosophy Of Education, Justice, Equality, Islamic Values.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relevansi prinsip Filsafat Pendidikan Islam terhadap proses demokratisasi pendidikan di Indonesia. Demokratisasi pendidikan dipahami sebagai upaya menciptakan akses dan kesempatan belajar yang setara bagi seluruh warga negara, sejalan dengan nilai-nilai keadilan, kesetaraan, musyawarah, serta penghargaan terhadap martabat manusia yang menjadi prinsip dasar dalam ajaran Islam. Menggunakan metode penelitian kualitatif dengan studi pustaka, penelitian ini menelaah literatur terkait konsep demokratisasi pendidikan, nilai-nilai filsafat pendidikan Islam, serta berbagai problematika implementasi demokratisasi di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa demokratisasi pendidikan di Indonesia masih menghadapi kendala berupa ketimpangan akses, budaya pembelajaran yang otoriter, ketidaksesuaian antara kebijakan dan implementasi, tantangan era digital, serta degradasi nilai moral dan spiritual. Prinsip-prinsip pendidikan Islam seperti tauhid, syura, keadilan, moderasi, dan kewajiban menuntut ilmu menawarkan landasan filosofis dan normatif untuk memperkuat demokratisasi pendidikan agar lebih inklusif, humanis, dan berorientasi pada pembentukan karakter. Penelitian ini menegaskan bahwa integrasi nilai-nilai Islam dalam sistem pendidikan nasional dapat menjadi solusi dalam mewujudkan pendidikan yang adil, partisipatif, dan relevan dengan perkembangan zaman.

Kata Kunci: Demokratisasi Pendidikan, Filsafat Pendidikan Islam, Keadilan, Kesetaraan, Nilai-Nilai Islam.

A. Pendahuluan

Pada pendidikan Islam, demokrasi berasal dari ajaran Islam yang menekankan pada nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan musyawarah. Sejak zaman Nabi Muhammad SAW, konsep demokrasi telah diterapkan melalui praktik musyawarah dalam pengambilan keputusan, yang memungkinkan orang berpartisipasi dan adanya sikap

menghargai terhadap pendapat setiap individu. Meskipun kata "demokrasi" tidak ditemukan dalam Al-Qur'an atau Hadis, prinsip-prinsip dasar demokrasi seperti kebebasan, kesetaraan, dan keadilan sangat penting dalam ajaran Islam. Hal ini selaras dengan firman Allah pada surat an-Nahl ayat 90 yang artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan

kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat". Ayat di atas menegaskan bahwa prinsip demokrasi harus menerapkan keadilan yang sama bagi semua pihak tanpa adanya perbedaan atau diskriminasi. Demokrasi dalam pendidikan sangat penting karena pendidikan berfungsi sebagai sarana untuk membangun karakter siswa dan memberi mereka pemahaman tentang hak dan kewajiban mereka sebagai anggota masyarakat. Pendidikan Islam yang demokratis bertujuan untuk menghasilkan siswa yang merdeka dalam berpikir, mampu berpartisipasi aktif dalam masyarakat, dan menghargai perbedaan pendapat (Siti Imroatul Latifah & Qalbi Khoiri, 2025).

Adanya kesenjangan pendidikan masih sangat besar di kota-kota besar. Pendidikan kelas atas dan rendah, orang kaya dan miskin, maju dan stagnan, benar-benar dipertontonkan seperti sirkus. Negara terus menghadapi dilema pendidikan. Pendidikan masih tidak merata di daerah terpencil. Faktor ekonomi masih merupakan "momok" yang menakutkan. Alih-alih untuk

mendapatkan fasilitas seperti di kota, untuk bersekolah ditingkat kabupaten hanyalah angan-angan semata. Mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan fasilitas seperti di kota. Jadi demokratisasi pendidikan Islam adalah solusi untuk model pendidikan Indonesia. Anak-anak bangsa membutuhkan pendidikan yang demokratis, nyaman untuk belajar, merata di seluruh masyarakat, dan sesuai dengan tuntutan zaman sekarang ini. Pendidikan yang demokratis berarti semua anak mempunyai kesempatan yang sama untuk belajar di sekolah sesuai dengan kemampuan mereka (M. Iqbal, et al., 2022). Dalam hal pendidikan di Indonesia, tidak bisa terlepas dari konsep knowledge and power (pengetahuan dan kuasa). Dengan kata lain, pemerintah bertanggung jawab atas transfer of knowledge and transfer of value untuk memastikan bahwa rakyatnya hidup sejahtera. Dunia pendidikan, terutama institusi pendidikan yang dipromosikan oleh pemerintah, lebih cenderung menggunakan sistem kelas dan berfokus pada korporasi pendidikan. Seolah-olah lembaga pendidikan mengabaikan anak-anak yang pintar tapi kurang

mampu dibandingkan dengan anak-anak bodoh dan tapi mampu. Problematika tersebut menjadikan rakyat Indonesia gelisah karena pemerintah belum sepenuhnya memfasilitasi hak pendidikan mereka (Moh Ismail, 2016).

Dalam pendidikan Islam, konsep demokratisasi pendidikan mengacu pada usaha untuk memastikan bahwa pendidikan harus dapat diakses oleh semua kalangan tanpa memandang dari latar belakang sosial, ekonomi, atau jenis kelamin mereka. Ide ini didasarkan pada nilai-nilai ajaran Islam yang menekankan pada keadilan, kesetaraan, dan hak setiap orang untuk memperoleh pendidikan. Karena dalam Islam mengajarkan bahwa setiap insidividu memiliki kesetaraan di hadapan Allah, Ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap orang, termasuk perempuan dan kelompok marginal, memiliki akses yang sama ke pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pendidikan Islam harus memastikan bahwa tidak ada hambatan yang menghalangi siswa dalam belajar. belajar (Martina, et al., 2023).

Dari permasalahan diatas, terdapat suatu masalah yang berhubungan dengan nilai dan praktik demokratisasi Pendidikan di Indonesia. Untuk memperoleh informasi lebih jauh tentang kajian demokratisasi Pendidikan di Indonesia yang dihubungkan dengan prinsip Filsafat Pendidikan Islam, maka tulisan ini akan mengkaji lebih dalam dengan judul “Relevansi Prinsip Filsafat Pendidikan Islam terhadap Demokratisasi Pendidikan di Indonesia”.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi pustaka. Pendekatan kualitatif digunakan karena penelitian ini menekankan analisis terhadap teks dan gagasan filsafat pendidikan, bukan pada pengumpulan data lapangan (Sugiyono, 2018). Penelitian studi pustaka dipilih karena seluruh data berasal dari sumber tertulis seperti buku, jurnal ilmiah, dan karya tokoh filsafat pendidikan (Zed, 2014). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur, pembacaan mendalam, dan pencatatan hasil temuan sesuai pedoman penelitian pustaka. Analisis

data menggunakan analisis isi (Krippendorff, 2004) dan analisis filosofis untuk menafsirkan, mengkritisi, serta mensintesis gagasan pendidikan dari berbagai literatur.

C.Hasil Penelitian dan Pembahasan Konsep Demokratisasi Pendidikan

Demokrasi secara etimologis berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata "demos" yang berarti rakyat dan "kratos" yang berarti pemerintahan. Demokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan yang berasal dari rakyat, dijalankan oleh rakyat, dan ditujukan untuk kepentingan rakyat. Maka untuk menciptakan kehidupan yang demokratis, satu proses harus diikuti di beberapa bidang kehidupan demokratisasi (Lalu Nasrulloh & Zulkarnain, 2023). Demokratisasi merupakan lanjutan proses dalam menuju demokrasi. Dalam konteks pendidikan, demokratisasi digunakan sebagai sarana dan kesempatan yang strategis dalam menciptakan lingkungan yang demokratis. Pendidikan demokrasi dapat didefinisikan sebagai suatu proses sosialisasi, internalisasi, dan penerapan ide dan prinsip demokrasi melalui pembelajaran. Semua warga

negara harus memahami, menyadari, dan mendukung proses demokratisasi pendidikan agar sistem tersebut dapat berjalan sesuai koridor (Dadan Mardani, et al., 2023).

Pendidikan demokratis menempatkan anak sebagai yang terdepan dan menjadi pusat perhatian. Saling mendukung berbagai hubungan demokrasi dan pendidikan. Prinsip-prinsip demokrasi pendidikan dalam Islam meliputi (Martina, et al., 2023):

1. Inklusi yaitu menyediakan akses pendidikan yang setara untuk semua individu, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau budaya. Ini mencakup pendidikan untuk anak-anak, dewasa, pria, dan wanita.
2. Prinsip keadilan. Hal ini terdiri dari aspek-aspek seperti alokasi sumber daya yang adil, perlindungan hak-hak individu, dan peningkatan kesempatan pendidikan bagi semua.
3. Demokratisasi pendidikan dalam Islam mengajak partisipasi aktif semua pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan pendidikan. Ini termasuk siswa, orang tua, guru, dan komunitas

lokal. Keputusan-keputusan penting seharusnya tidak hanya diambil oleh otoritas pendidikan, tetapi juga melibatkan suara dan perspektif beragam.

4. Prinsip kesetaraan berarti bahwa setiap orang memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan berkualitas, tanpa adadiskriminasi berdasarkan gender, ras, atau status sosial.
5. Konsistensi dengan Nilai Islam, Demokratisasi pendidikan dalam Islam juga harus sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam. Ini termasuk memastikan bahwa pendidikan mendukung perkembangan moral, etika, dan spiritual siswa sesuai dengan ajaran Islam.

Prinsip demokrasi dalam Islam menjadi dasar prinsip demokrasi pendidikan Islam. Dengan kata lain, demokrasi pendidikan Islam adalah penerapan demokrasi Islam dalam pendidikan Islam. Beberapa bentuk pelaksanaan prinsip demokratisasi pendidikan Islam diantaranya (Turham AG, 2021):

1. **Kebebasan bagi guru dan siswa,** di sini, kebebasan mencakup: kebebasan untuk berkreasi, mengembangkan

peluang atau potensi, Kebebasan untuk menyatakan pendapat.

2. **Persamaan terhadap Siswa dalam Pendidikan Islam,** islam memberikan kesempatan yang sama bagi semua siswa untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran. Tidak ada perbedaan derajat atau martabat antara siswa dan guru karena pendidikan dilakukan di dalam suatu ruangan dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan dari guru. Penyediaan kesempatan belajar yang sama bagi semua siswa adalah alasan mengapa guru harus mengajar siswa yang tidak mampu bersama dengan siswa yang mampu. Dalam proses pendidikan dan pengajaran, pendidik harus dapat memberikan kesempatan yang sama kepada semua siswa tanpa pilih kasih atau membedakan siswa yang heterogen.

3. **Penghormatan akan Martabat Individu dalam Pendidikan,** seseorang harus memperlakukan orang lain dengan cara yang diharapkan mereka perlakukan diri mereka sendiri. Dalam sejarah Islam, Nabi Muhammad saw. telah menunjukkan

penghormatan terhadap martabat orang lain dengan membebaskan kaum tertindas atau tawanan perang di Mekkah, seperti peristiwa memerdekakan budak.

Tujuan demokratisasi pendidikan dalam Islam adalah untuk menjamin bahwa pendidikan merupakan kesempatan bagi semua orang, bukan hanya hak, untuk berkembang dan berkontribusi positif bagi masyarakat dan kemanusiaan. Prinsip-prinsip ini menyoroti perlunya pendidikan sebagai alat untuk mencapai keadilan. Pertumbuhan social, intelektual, dan pengembangan karakter dalam kerangka ajaran Islam (Martina, et al., 2023).

Implementasi, Problematika, dan Solusi Demokratisasi Pendidikan di Indonesia

Mengambil dari prinsip dasar pendidikan Islam Hasim Amir, yang menyatakan bahwa pendidikan Islam adalah pendidikan idealistik, yang berarti pendidikan humanistik, pragmatik, integralistik dan berakar pada budaya yang kuat. Menurut A. Malik Fadjar, pendapat dari Hasim Amir ini dapat digunakan sebagai gagasan untuk demokratisasi pendidikan Islam dalam menghadapi

transformasi masyarakat Indonesia, yang diantaranya (Lalu Nasrulloh & Zulkarnain: 2023):

1. Pendidikan Integralistik

Pendidikan integralistik adalah model pendidikan yang berfokus pada unsur-unsur kehidupan. Model ini mencakup pendidikan yang berfokus pada rabbaniyah (ketuhanan), insaniyah (kemanusiaan), dan alamiyah (alam pada umumnya). Ini dianggap penting untuk mewujudkan kehidupan yang baik dan mewujudkan rahmatan lil 'alamin. Selain itu, pendidikan ini menganggap manusia sebagai pribadi jasmani-rohani, intelektual, perasaan, dan individu-sosial. Diharapkan bahwa pendidikan integralistik bisa menghasilkan manusia (siswa) yang memiliki integritas tinggi, yang senantiasa selalu bersyukur dan menyatu dengan kehendak Tuhan, menyatu dengan dirinya sendiri sehingga tidak mempunyai kepribadian belah atau mendua, menyatu bersama masyarakat untuk menghilangkan kerusakan sosial, dan menyatu dengan alam untuk tidak membuat kerusakan, namun harus bisa menjaga dan

memperdayakan potensi alam sesuai dengan kebutuhan manusia.

2. Pendidikan Humanistik

Pendidikan humanistik adalah model pendidikan yang berfokus pada manusia sebagai manusia (humanisasi), yaitu makhluk yang diciptakan oleh Tuhan dengan fitrahnya dan perlu memiliki kemampuan untuk hidup, mempertahankan, dan berkembang. Dengan pendidikan humanistik diharapkan bisa mengembalikan peran dan fungsi manusia, yakni mengembalikan manusia kepada fitrahnya sebagai sebaik-baiknya makhluk. Dengan demikian, pendidikan humanistik diharapkan dapat mengembangkan dan membentuk manusia menjadi "manusiawi" dalam cara mereka berpikir, merasakan, berkemauan, dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai luhur kemanusiaan, sehingga diharapkan dapat menggantikan sifat individualistik dan egosentrik.

3. Pendidikan Pragmatik

Pendidikan pragmatik merupakan pendidikan yang melihat manusia sebagai makhluk hidup yang selalu membutuhkan

sesuatu untuk bisa melangsungkan, mempertahankan, dan mengembangkan hidupnya, seperti berpikir, merasakan, aktualisasi diri, keadilan, dan kebutuhan spiritual ilahiyah. Oleh karena itu, model pendidikan yang menggunakan pendekatan pragmatik diharapkan dapat menghasilkan manusia yang sadar akan kebutuhan-kebutuhan dalam hidupnya, peka dengan adanya masalah, dan bisa memberikan perbedaan manusia dari situasi yang tidak manusiawi.

4. Pendidikan yang Berakar pada Budaya

Pendidikan yang berakar pada budaya, yang berarti belajar dari sejarah-sejarah, baik sejarah kemanusiaan maupun kebudayaan bangsa, kelompok etnis, atau masyarakat tertentu. Dengan demikian, model pendidikan yang berakar pada budaya diharapkan dapat membentuk individu yang memiliki kepribadian, harga diri, dan kepercayaan pada diri sendiri, serta membangun peradaban yang didasarkan pada budaya mereka sendiri, yang akan

menjadi warisan monumental dari nenek moyangnya dan bukan budaya negara lain. Ini tidak berarti kita menentang modernitas, perubahan, ataupun reformasi. sebaliknya, kita hanya menolak arus transformasi budaya dari luar tanpa adanya alasan yang kuat.

Problematisa yang biasanya terjadi dalam implementasi demokratisasi pendidikan di Indonesia meliputi:

1. Kesenjangan Akses dan Kualitas Pendidikan

Affandi dan Suastra (2024) dalam Jurnal Basicedu menyebutkan bahwa pendidikan di wilayah perkotaan jauh lebih berkembang dibandingkan dengan daerah pedesaan dan terpencil. Hal ini disebabkan oleh ketimpangan sarana dan prasarana pendidikan, ketersediaan guru profesional, serta akses internet yang belum merata. Kondisi tersebut bertentangan dengan prinsip utama demokratisasi pendidikan, yaitu kesetaraan kesempatan belajar bagi semua warga negara. Pemerintah memang telah berupaya melalui program

afirmatif seperti BOS, KIP, dan Merdeka Belajar, namun pelaksanaannya belum sepenuhnya mampu menjangkau kelompok masyarakat marginal. Selain itu, faktor ekonomi juga menjadi penghalang. Banyak keluarga berpenghasilan rendah kesulitan membiayai kebutuhan pendidikan anaknya, walaupun sekolah diklaim “gratis”. Biaya tambahan seperti seragam, transportasi, atau perangkat digital menjadi beban tersendiri. Dalam konteks ini, demokratisasi pendidikan tidak hanya menuntut kebijakan akses gratis, tetapi juga keadilan ekonomi dan sosial agar semua peserta didik dapat belajar secara bermartabat.

2. Budaya Otoriter dan Minimnya Partisipasi dalam Pembelajaran

Armis, Shidqi, dan Maulia (2023) dalam Civilia Journal mengemukakan bahwa salah satu hambatan utama demokratisasi pendidikan adalah masih kuatnya budaya otoriter dalam proses belajar-mengajar. Guru masih sering menjadi pusat otoritas tunggal di kelas, sementara siswa hanya dianggap sebagai penerima informasi. Model

pembelajaran semacam ini menutup ruang dialog, kreativitas, dan keberanian berpikir kritis peserta didik. Padahal, prinsip demokratisasi pendidikan menekankan pembelajaran yang dialogis dan partisipatif, di mana guru berperan sebagai fasilitator, bukan penguasa pengetahuan. Paulo Freire (dalam *Pedagogy of the Oppressed*) menyebut model otoriter ini sebagai *banking education*, yaitu pendidikan yang hanya “menyimpan” informasi ke dalam pikiran siswa tanpa membangun kesadaran kritis. Di banyak sekolah, siswa masih takut mengemukakan pendapat karena khawatir dianggap tidak sopan atau melawan guru. Kondisi ini jelas menghambat proses pembentukan warga negara yang demokratis dan kritis, sebab sekolah seharusnya menjadi ruang latihan demokrasi sejak dini. Selain itu, sistem evaluasi yang lebih menekankan aspek kognitif daripada afektif juga turut memperparah situasi. Peserta didik sering diarahkan hanya untuk mengejar nilai ujian, bukan untuk membangun argumentasi, kolaborasi, dan

empati. Akibatnya, semangat demokrasi menjadi dangkal dan hanya bersifat formalistik.

3. Ketimpangan Kebijakan dan Implementasi Demokrasi Pendidikan

Simangunsong et al., (2024) dalam *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* mengidentifikasi adanya ketimpangan antara kebijakan dan pelaksanaan di lapangan. Kebijakan pendidikan di Indonesia sering kali berubah-ubah mengikuti arah politik, bukan hasil dari evaluasi akademis yang mendalam. Akibatnya, program pendidikan sering tidak konsisten dan menimbulkan kebingungan di tingkat pelaksana, seperti guru dan kepala sekolah. Sebagai contoh, implementasi Kurikulum Merdeka yang bertujuan memberi kebebasan belajar sering dihadapkan dengan kenyataan minimnya pelatihan bagi guru. Di sisi lain, birokrasi pendidikan masih sangat sentralistik, sehingga sekolah belum sepenuhnya otonom dalam mengelola pembelajaran sesuai karakteristik siswa.

4. Tantangan Demokratisasi di Era Revolusi Industri 4.0

Fiska Ilyasir (2024) menyoroti bahwa revolusi industri 4.0 membawa tantangan baru bagi dunia pendidikan. Pemanfaatan teknologi digital dalam pembelajaran memang membuka peluang bagi terciptanya sistem pendidikan yang lebih terbuka, namun di sisi lain juga melahirkan kesenjangan digital yang semakin tajam. Peserta didik di kota besar dengan akses internet cepat dan perangkat modern jauh lebih mudah berpartisipasi dalam pembelajaran daring dibandingkan dengan siswa di daerah pedesaan. Kesenjangan ini menjadikan demokratisasi pendidikan berbasis teknologi masih belum inklusif. Selain itu, teknologi juga membawa arus informasi yang sangat deras dan tidak selalu mendidik. Tanpa kemampuan literasi digital yang baik, siswa dapat terjebak pada konten dangkal, hoaks, atau budaya instan. Oleh karena itu, demokratisasi pendidikan di era digital harus diimbangi dengan pendidikan etika digital, literasi kritis, dan penguatan karakter.

5. Krisis Nilai Spiritual dan Moral

Dalam perspektif pendidikan Islam, demokrasi tidak hanya berbicara tentang kebebasan, tetapi juga tanggung jawab moral. Nasrulloh dan Zulkarnain (2023) mengingatkan bahwa demokratisasi pendidikan yang terlepas dari nilai-nilai spiritual akan kehilangan arah. Fenomena degradasi moral, menurunnya sopan santun, dan rendahnya empati sosial menunjukkan bahwa pendidikan demokratis harus berakar pada nilai keagamaan dan kemanusiaan. Oleh karena itu, pendidikan Islam memiliki peran strategis dalam mengintegrasikan nilai keadilan, musyawarah, dan kasih sayang dalam sistem pendidikan nasional agar demokratisasi tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga substansial.

Solusi dari adanya problematika yang muncul dalam implementasi demokratisasi pendidikan di Indonesia

1. Penguatan Kurikulum yang Inklusif dan Partisipatif

Untuk mengatasi problematika di atas, langkah pertama adalah transformasi kurikulum agar lebih menekankan pada pengembangan

kemampuan berpikir kritis, kolaboratif, dan kreatif. Kurikulum yang demokratis harus memberikan ruang bagi peserta didik untuk berpendapat, berdialog, dan berpartisipasi dalam perencanaan pembelajaran. Guru dapat menerapkan model project-based learning, cooperative learning, dan dialogical learning untuk menciptakan interaksi dua arah yang bermakna. Selain itu, kurikulum harus memperhatikan konteks lokal. Setiap sekolah memiliki karakteristik sosial dan budaya yang berbeda, sehingga implementasi kurikulum seharusnya memberi ruang kebebasan yang lebih luas bagi sekolah dan guru untuk berinovasi sesuai kebutuhan peserta didik.

2. Peningkatan Kompetensi dan Peran Guru sebagai Agen Demokrasi

Guru bukan hanya penyampai pengetahuan, tetapi juga teladan dalam sikap demokratis seperti menghargai perbedaan, terbuka terhadap kritik, dan mendorong siswa berpikir mandiri. Affandi & Suastra (2024) menekankan bahwa guru

perlu diberikan pelatihan yang berkelanjutan untuk menguasai metode pembelajaran dialogis dan reflektif. Pemerintah dan lembaga pendidikan perlu mengembangkan program teacher empowerment agar guru mampu menjadi fasilitator yang adil, bijak, dan inspiratif. Dengan demikian, pendidikan tidak hanya mencetak peserta didik yang cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki kesadaran sosial dan tanggung jawab demokratis.

3. Keterlibatan Masyarakat dan Kolaborasi Sosial

Demokratisasi pendidikan tidak akan berhasil jika hanya mengandalkan lembaga formal. Masyarakat harus dilibatkan secara aktif sebagai mitra sekolah. Partisipasi masyarakat dapat berupa dukungan dalam pengawasan kebijakan, kegiatan belajar berbasis komunitas, dan pembentukan forum musyawarah pendidikan di tingkat lokal. Dengan melibatkan orang tua, tokoh masyarakat, dan organisasi sosial, pendidikan akan menjadi proses yang hidup, terbuka, dan relevan dengan kebutuhan lingkungan. Keterlibatan ini juga

memperkuat rasa tanggung jawab bersama dalam mewujudkan pendidikan yang adil dan merata.

4. Integrasi Nilai-Nilai Islam dalam Demokratisasi Pendidikan

Nilai-nilai Islam seperti syura (musyawarah), al-'adl (keadilan), rahmah (kasih sayang), dan ukhuwah (persaudaraan) merupakan fondasi moral bagi demokratisasi pendidikan. Guru dan lembaga pendidikan Islam perlu menanamkan prinsip bahwa kebebasan berpikir harus disertai tanggung jawab moral dan spiritual. Dalam konteks ini, demokratisasi pendidikan tidak sekadar memberikan kebebasan, tetapi juga mengarahkan peserta didik agar mampu menggunakan kebebasannya untuk kemaslahatan bersama.

5. Penguatan Literasi Digital dan Etika Sosial

Pendidikan demokratis harus menanamkan literasi digital kritis agar peserta didik dapat memilah informasi, menghargai privasi, serta menggunakan teknologi untuk kebaikan sosial. Program seperti digital citizenship education perlu diperkuat untuk menyiapkan generasi yang

cerdas, bijak, dan bertanggung jawab di ruang digital.

6. Penguatan Kebijakan dan Tata Kelola Pendidikan

Terakhir, pemerintah perlu memperkuat aspek tata kelola pendidikan yang transparan dan partisipatif. Pembuatan kebijakan harus melibatkan guru, siswa, dan masyarakat. Pengawasan terhadap pelaksanaan program pendidikan harus terbuka dan dapat diakses publik. Selain itu, otonomi sekolah perlu diperluas agar lembaga pendidikan memiliki kebebasan berinovasi sesuai dengan konteks lokal. Dengan tata kelola yang demokratis, pendidikan dapat menjadi sarana pemberdayaan masyarakat, bukan sekadar alat administratif negara.

Relevansi Prinsip Filsafat Pendidikan Islam dalam Konteks Demokratisasi Pendidikan

Dalam Islam, demokratisasi pendidikan tercermin kedalam beberapa aspek, diantaranya yaitu (M. Iqbal, et al., 2022):

1. Tauhid: Paradigma untuk Pembebasan, pembebasan dari anasir-anasir pengkultusan, penyembahan, penindasan, dan

perbudakan. Jadi, tauhid dapat digunakan sebagai dasar untuk demokratisasi pendidikan.

2. Syura: Wahana Keterbukaan, syura berarti pengambilan keputusan secara bersama dengan tujuan untuk menjaga semangat kolektivitas dan adanya kemungkinan kesalahan yang dilakukan oleh individu. Syura adalah komponen penting dari demokrasi, dan bersama dengannya datang nilai keterbukaan. Keterbukaan sangat penting dalam pemikiran pendidikan demokratis. Musyawarah menegaskan nilai keterbukaan dan tanggung jawab setiap anggota.

3. Al-Adlu: Masyarakat Tanpa Kelas, keadilan dapat diartikan dengan tidak menyimpang dari kebenaran, tidak merusak, dan tidak merugikan diri sendiri atau orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari, keadilan muncul dalam berbagai bentuk. Misalnya, keadilan berarti menghukum seseorang karena tindakannya yang salah atau memberi ganjaran seseorang karena tindakan baiknya.

4. Amar Ma'ruf Nahi Munkar: Dikaitkan dengan Kualitas Manusia, sebagai umat Islam, harus memiliki kekuatan fisik dan mental untuk melakukan perbaikan dan mencegah kemunkaran berdasarkan tauhid. Posisi sebagai umat yang terbaik baru merupakan kondisi bersyarat, yang berarti bahwa posisi itu hanya dapat diraih jika seseorang memiliki kualitas diri yang memadai (bertauhid, beramal shalih, bertakwa, dan ulul albab). Kualitas-kualitas ini memungkinkan mereka untuk melakukan rekonstruksi sosial, mengubah yang buruk menjadi yang lebih baik.

5. Tawassuth: Prinsip Moderasi, sikap Tawassuth mengutamakan kepada prinsip hidup yang mengangkat sikap adil dan lurus di tengah-tengah kehidupan bersama, bertindak lurus dan selalu mempunyai sifat membangun serta menghindari segala bentuk pendekatan yang bersikap ekstrem. Implementasi dari sikap Tawassuth dalam bidang pendidikan dijumpa pada lembaga Islam tertua yakni pesantren. Pesantren merupakan

lembaga pengembangan keilmuan dan pengajaran Islam di Nusantara yang selalu menekankan sikap moderat. Dalam lembaga pendidikan pesantren mampu mengadopsi sistem pendidikan Barat (sekolah formal) tanpa menghapus jati diri yang dimiliki, yang mempunyai ciri khazanah keilmuan klasik (kitab kuning).

- 6. Kewajiban dan Hak Manusiawi dalam Perkembangan Ilmu,** dalam Islam, menuntut ilmu merupakan suatu kewajiban dan hak asasi setiap manusia. Setiap orang berhak atas pengetahuan sebanyak mungkin. Seperti Hadis Nabi yang berarti:
- “Menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim laki-laki dan perempuan”*

Hadist ini menunjukkan bahwa demokratisasi pendidikan terdapat dalam islam, dengan artian tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan dalam hal kewajiban belajar. Dalam pendidikan Islam, demokratisasi harus diterapkan. Sebagai instrumen alat untuk menyatukan dan mempersatukan bangsa dalam pendidikan, prinsip-prinsip

egaliter dan demokratis harus diterapkan secara menyeluruh. Untuk alasan ini, Nabi Muhammad Saw menggambarkannya sebagai Uswatun Hasanah, atau contoh kebaikan.

Bagaimana demokratisasi diterapkan dalam pendidikan Islam dapat berbeda-beda tergantung pada interpretasi dan tradisi yang ada di dunia Islam. Namun, prinsip-prinsip dasar seperti keadilan, kesetaraan, partisipasi, dan moral terus menjadi dasar bagi filsafat pendidikan Islam yang berusaha mencapai tujuan yang sejalan dengan ajaran agama Islam. Beberapa tokoh filosof Islam telah memberikan kontribusi yang signifikan kepada pemikiran tentang demokratisasi dalam pendidikan Islam. Beberapa di antaranya adalah (Siti Sumadiyah, et al., 2023):

- 1. Al-Farabi:** Al-Farabi merupakan tokoh filosof Islam dari aliran falsafah Peripatetik yang hidup dari tahun 872 hingga 950 M. Dia memiliki pandangan yang penting tentang bagaimana pendidikan harus dilakukan dalam masyarakat Islam. Ia mencetuskan ide gagasan pendidikan sebagai alat untuk membangun masyarakat yang

adil dan harmonis. Al-Farabi berpendapat bahwa masyarakat yang demokratis memerlukan penduduk yang terdidik dan terlatih dalam ilmu pengetahuan, etika, dan moralitas.

2. Ibnu Sina (Avicenna): Ibnu Sina hidup dari tahun 980 hingga 1037 M dan merupakan tokoh intelektual yang sangat berpengaruh dalam perkembangan filsafat Islam. Dalam karyanya, "Kitab al-Shifa", Ibnu Sina mengemukakan pentingnya pendidikan untuk membangun individu dan masyarakat yang adil. Dia mendukung pendidikan yang mencakup etika, logika, dan sains, dan menekankan bahwa individu harus aktif terlibat dan berpartisipasi dalam proses pembelaan.

3. Al-Ghazali: Al-Ghazali merupakan seorang filosof dan teolog Islam yang terkenal yang hidup dari tahun 1058 hingga 1111 M. Dalam pendidikan, beliau menekankan pentingnya akal, etika, dan moralitas. Dalam karyanya yang dikenal sebagai "Ihya Ulum al-Din", atau Kembalinya Sains Religius, ia

menekankan bahwa pendidikan harus membentuk karakter seseorang dan membantu mereka memahami ajaran Islam dengan lebih baik.

4. Ibnu Khaldun: Ibnu Khaldun ialah seorang sejarawan dan filosof Sosiologi Islam terkemuka yang hidup dari tahun 1332 hingga 1406 M. Dia melihat pendidikan sebagai komponen penting dalam kemajuan dan kemunduran sebuah peradaban. Dalam karyanya yang terkenal, "Muqaddimah", ia menjelaskan betapa pentingnya pendidikan untuk menjaga sistem sosial dan politik yang stabil.

E. Kesimpulan

Demokratisasi pendidikan dalam perspektif Filsafat Pendidikan Islam merupakan upaya untuk mewujudkan sistem pendidikan yang adil, inklusif, dan berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, kesetaraan, serta musyawarah. Prinsip-prinsip tersebut sejalan dengan ajaran Islam yang menempatkan semua manusia setara di hadapan Allah dan berhak memperoleh pendidikan tanpa diskriminasi. Dalam pendidikan Islam, demokratisasi menekankan

kebebasan berpikir, penghargaan terhadap martabat individu, serta partisipasi aktif seluruh komponen pendidikan. Kajian ini menunjukkan bahwa penerapan demokratisasi pendidikan di Indonesia masih menghadapi berbagai problematika, seperti ketimpangan akses pendidikan, budaya pembelajaran yang masih otoriter, kesenjangan kebijakan dan implementasi di lapangan, tantangan era digital, serta krisis nilai moral dan spiritual. Kendala tersebut menunjukkan bahwa demokratisasi pendidikan belum berjalan secara optimal dan masih memerlukan penguatan dari berbagai aspek.

Filsafat Pendidikan Islam menawarkan fondasi normatif dan filosofis berupa prinsip tauhid, syura, keadilan, moderasi, serta kewajiban menuntut ilmu sebagai landasan demokratisasi. Nilai-nilai ini relevan untuk membangun sistem pendidikan nasional yang tidak hanya demokratis secara prosedural, tetapi juga substansial, bermoral, dan berorientasi pada kemaslahatan. Solusi yang ditawarkan mencakup penguatan kurikulum yang inklusif dan partisipatif, peningkatan kompetensi guru sebagai agen demokrasi,

pelibatan masyarakat secara kolaboratif, integrasi nilai-nilai keislaman dalam pendidikan, literasi digital, serta tata kelola pendidikan yang transparan dan partisipatif. Dengan demikian, demokratisasi pendidikan berbasis nilai-nilai Islam berpotensi menjadi model ideal dalam meningkatkan kualitas dan pemerataan pendidikan bagi seluruh anak bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

- Affandi, L. H., & Suastra, I. W. (2024). *Tantangan demokratisasi Pendidikan Indonesia*. Jurnal Basicedu, 8(3), 1733–1742.
<https://jbasic.org/index.php/basicedu/article/view/7477>
- Armis, M., Shidqi, M., & Maulia, S. T. (2023). *Demokratisasi pendidikan*. Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan, 2(2), 116–126.
<https://jurnal.anfa.co.id/index.php/civilia/article/view/333>
- Dedi Arianto. (2023). KONSEP DEMOKRASI DALAM PENDIDIKAN ISLAM. *Tarbiyatul Misbah (Jurnal Kajian Ilmu Pendidikan)*, 16(1), 15–27.
<https://doi.org/10.70688/tarbiyatulmisbah.v16i1.329>
- Freire, P. (2000). *Pedagogy of the oppressed* (30th anniversary ed.). New York, NY: Continuum.
- Ilyasir, F. (2024). *Pendidikan demokrasi di era revolusi industri 4.0*. Jurnal Pendidikan Pancasila dan

- Kewarganegaraan, 11(1), 54–65.
<https://journal.uny.ac.id/index.php/jppf/article/view/25998>
- Iqbal, M. (2022). Demokratisasi Pendidikan dalam Pendidikan Islam. *CONTEMPLATE: Jurnal Ilmiah Studi Keislaman*, 3(02), 58-70.
- Ismail, M. (2016). DEMOKRATISASI PENDIDIKAN ISLAM DALAM PANDANGAN KH. ABDUL WAHID HASYIM. *Jurnal Pendidikan Agama Islam (Journal of Islamic Education Studies)*, 4(2), 315–336.
<https://doi.org/10.15642/jpai.2016.4.2.315-336>
- Latifah, S. I., & Khoiri, Q. (2025). DEMOKRASI DALAM PENDIDIKAN ISLAM: KONSEP DAN IMPLEMENTASI. *Dirosat: Journal of Islamic Studies*, 10(1), 75-86.
- Klaus Krippendorff, Content Analysis: An Introduction to Its Methodology (Thousand Oaks: Sage Publications, 2004).
- Mardani, D., Susiawati, I., & Fathimah, N. S. (2023). KURIKULUM MERDEKA DALAM DEMOKRATISASI PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA. *Islamic Management: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 6(01), 25–36.
<https://doi.org/10.30868/im.v6i01.3310>
- Martina, Fitri Sarinda, Dwi Noviani, & Hilmin Hilmin. (2023). Demokratisasi Pendidikan Dalam Islam . *Concept: Journal of Social Humanities and Education*, 2(4), 153–166.
<https://doi.org/10.55606/concept.v2i4.775>
- Moleong, Lexy. (2019). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Rosdakarya.
- Nasrulloh, L. N., & Zulkarnain, Z. (2023). Demokrasi Pendidikan dalam Perspektif Pendidikan Islam. *Al-Riwayah : Jurnal Kependidikan*, 15(2), 273–289. <https://doi.org/10.47945/al-riwayah.v15i2.862>
- Simangunsong, T. C., Gultom, N. H., Fikri, R., & Arif, H. (2024). *Problematisasi dan perubahan kebijakan pendidikan di Indonesia*. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan (JIIP)*, 7(2), 4772–4785.
<https://jiip.stkipyapisdompu.ac.id/jiip/index.php/JIIP/article/view/4772>
- Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D. Alfabeta.
- Sumadiyah, S., Jumari, J., Haris, A., & Mansur, R. (2023). Demokrasi Perspektif Filsafat Pendidikan Barat dan Islam. *Jurnal Sustainable*, 6(2), 824-830.
<https://doi.org/10.32923/kjimp.v6i2.4220>
- Turham, A. G. (2021). Pendidikan Demokrasi dalam Perspektif Filsafat Pendidikan Islam. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 2(9), 425069.
- Zed, Mestika. (2014). Metode Penelitian Kepustakaan. Jakarta: Obor.